



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON
TAHUN 2025-2029

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketetapan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah yang menyatakan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf C angka 3 huruf e, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1- Kpt/O3/KPU /1/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dimana IKU KPU Provinsi/KIP Aceh, dan IKU KPU/KIP Kabupaten/ Kota ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta wajib direviu secara berkala;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/O9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan kinerja instansi Pemerintah;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 135/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU /I/2018 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tomohon
pada Tanggal 24 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON,

Ttd.

ALBERTIEN G. V. PIJOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum.



LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON NOMOR
9 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CARA PENGUKURAN	SATUAN DAN UKURAN KEBERHASILAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	<i>Publikasi informasi</i> <i>partai politik yang mutakhir X 100%</i> <i>Jumlah publikasi informasi</i>	Persen(kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya pengelolaan sistem informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan terpublikasi	SIPOL	Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai Indeks reformasi	Indeks Reformasi (nominal) Ukuran Keberhasilan : penilaian dengan kategori "Baik" dari indeks reformasi birokrasi KPU Kota	Indeks Reformasi Birokrasi	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai Akuntabilitas (nominal) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja KPU Kota	Hasil Evaluasi AKIP	Sub Bagian Perencanaan , Data dan Informasi
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah total Informasi publik yang terbuka	Nilai keterbukaan (nominal) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya nilai keterbukaan informasi Publik KPU Kota	E-PPID	Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan, Adil	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kota yang melaksanakan Pemilu /Pemilihan yang Aman dan Damai	<u>Jumlah penyelenggaraan yang aman dan damai</u> <i>Jumlah total KPU Kota yang menyelenggarakan Pemilu</i> X 100%	Persen(kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kota yang berlangsung secara aman dan damai	Laporan Pelaksanaan Tahapan	Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	<u>Jumlah sengketa hukum yang dimenangkan</u> <i>Jumlah total sengketa hukum KPU Kota</i> X 100%	Persen(kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kota sesuai jadwal serta ketentuan yang berlaku	Putusan	Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON,

Ttd.

ALBERTIEN G.V. PIJOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum.



LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON NOMOR
9 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TOMOHON

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	CARA PENGUKURAN	SATUAN DAN UKURAN KEBERHASILAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	$\frac{\text{Jumlah kesesuaian kompetensi pegawai}}{\text{Jumlah Standar Kompetensi}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya jumlah pegawai KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang kompetensinya sesuai dengan standar kompetensi penugasannya	Dokumen Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU Tahun Anggaran 2024 Periode II	Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
	Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Nilai evaluasi (nominal) Ukuran Keberhasilan : Peningkatan nilai akuntabilitas kinerja KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Hasil Evaluasi AKIP	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	Peningkatan nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Laporan Evaluasi Reformasi Birokrasi	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
	Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan	Persentase Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data Pemilih tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah data yang dimutakhirkan tepat waktu}}{\text{Jumlah Total KPU}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya jumlah / persentase pemutakhiran data Pemilih secara tepat waktu yang dilakukan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih dan SIDALIH	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi

	Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU Kabupaten/Kota yang Efektif dan Efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	Jumlah total revisi	Jumlah revisi (nominal) Ukuran Keberhasilan : Peningkatan jumlah revisi rencana kerja yang telah ditetapkan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	DIPA, RKAKL	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah laporan yang akuntabel dan tepat waktu}}{\text{Jumlah total laporan monitoring dan evaluasi}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Peningkatan jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang disusun secara akuntabel dan tepat waktu oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	E-Monev Bappenas	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
		Persentase target kinerja yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	$\frac{\text{Jumlah target kinerja yang tercapai}}{\text{Jumlah total target kinerja}} \times 100\%$		Perjanjian Kinerja, LKJIP	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian yang tepat waktu dan akurat	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang mendapat layanan kepegawaian tepat waktu}}{\text{Jumlah total pegawai}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Peningkatan jumlah/persentase pegawai KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	Aplikasi Pelayanan Kepegawaian untuk PNS : SIMPEG, MySAPK dan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara SIASN serta Dokumen Usulan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Tomohon	Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
		Persentase penegakan disiplin pegawai	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang disiplin}}{\text{Jumlah total pegawai}} \times 100\%$		Dokumen terkait Penegakan Disiplin Pegawai	Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
	Tersedianya data dan informasi pegawai	Persentase pegawai yang tercatat akurat dalam database kepegawaian berbasis teknologi informasi	$\frac{\text{Jumlah database pegawai yang tercatat akurat dalam database kepegawaian}}{\text{Jumlah total database pegawai}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Peningkatan jumlah/persentase pegawai KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang tercatat secara akurat dalam database kepegawaian berbasis teknologi informasi	Aplikasi Pelayanan Kepegawaian untuk PNS : SIMPEG, MySAPK dan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara SIASN serta Dokumen Usulan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Tomohon	Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah total laporan pertanggungjawaban}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya jumlah /persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan di lingkungan satker KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	LRA, Capaian Output, LPJ Bendahara dan SPP dan SPM	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah total laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan secara tepat waktu	Jumlah laporan (nominal) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Laporan Keuangan	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis aplikasi yang tepat waktu dan valid	Jumlah total Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang disusun dan disampaikan secara tepat waktu dan valid	Jumlah (nominal) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis aplikasi yang disampaikan secara tepat waktu dan valid oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	LPPA	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang	$\frac{\text{Jumlah Barang Milik Negara yang dapat dikelola}}{\text{Barang Milik Negara}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya kepatuhan dan ketertiban KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	Laporan BMN dan Stock Opname Persediaan	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah arsip yang dikelola sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA)}}{\text{Jumlah total arsip}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya jumlah / persentase pengelolaan arsip sesuai dengan Jadwal Retensi Arsip KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Retensi Arsip	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas satker	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja satker yang berfungsi dengan baik	$\frac{\text{Jumlah fasilitas perkantoran yang berfungsi dengan baik}}{\text{Jumlah total fasilitas perkantoran pendukung kinerja satker}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya jumlah / persentase fasilitas perkantoran yang berfungsi dengan baik untuk mendukung kinerja satker yang dimiliki KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Laporan BMN	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik

	Meningkatnya kualitas layanan persidangan	Persentase hasil notulensi/dokumentasi rapat pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 4 hari kerja	$\frac{\text{Jumlah hasil notulensi atau dokumentasi rapat pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja}}{\text{Jumlah total hasil rapat pleno}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya jumlah / persentase hasil notulensi/dokumentasi yang dapat diselesaikan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota paling lambat 2 hari kerja	Berita Acara Rapat Pleno Rutin dan Notulensi	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
	Meningkatnya penyelenggaraan SPIP	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mengisi dan menyampaikan kartu kendala SPIP secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah penyampaian dan pengisian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah total kartu kendala SPIP}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya kepatuhan dan kedisiplinan satker KPU Kabupaten/Kota yang mengisi dan menyampaikan kartu kendali secara lengkap dan tepat waktu	Risalah dan Kartu Kendali SPIP	Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum
Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah sengketa hukum yang dimenangkan}}{\text{Jumlah total sengketa hukum}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya jumlah/persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten/Kota	Putusan	Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	$\frac{\text{Proses PAW anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang dapat selesai dalam waktu 5 hari}}{\text{Jumlah proses PAW anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya jumlah / persentase proses PAW anggota DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota yang dapat diselesaikan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam waktu 5 hari kerja	Dokumen PAW	Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum
	Tersedianya pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	$\frac{\text{Jumlah data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan}}{\text{Jumlah total data kepengurusan dan Keanggotaan partai politik}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya jumlah / persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	SIPOL	Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	$\frac{\text{Jumlah tindak lanjut permohonan informasi melalui PPID (sesuai dengan SOP)}}{\text{Jumlah total permohonan informasi}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya jumlah / persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	E-PPID	Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

		Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kabupaten/Kota	<p><i>Jumlah informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan pemilu atau pemilihan yang dimuat di laman, media sosial KPU Provinsi, Kabupaten, Kota dan media massa</i></p> <hr/> <p><i>Jumlah total laman, media sosial KPU Provinsi, Kabupaten, Kota Dan media massa</i></p> <p>X 100%</p>	<p>Persen (kumulatif)</p> <p>Ukuran Keberhasilan :</p> <p>Meningkatnya jumlah / persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan media massa</p>	Laporan Bakohumas	Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
--	--	---	--	---	-------------------	---

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON,

Ttd.

ALBERTIEN G.V. PIJOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum.



OLIVA PUSUNG